



**PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM UPAYA MEMINTA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA
(Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

FADHIL ANDIKA SATRIA

NIM : 2220112005

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM UPAYA MEMINTA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA
(Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023)**

(Fadhil Andika Satria, 2220112005, xii + 142 Halaman, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

UNIVERSITAS ANDALAS
ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang besar, namun tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dan korporasi perikanan sering mengancam sumber daya tersebut. Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. “Liam Gil-2” dengan NRT *Integrated Industries Inc.*, sebuah korporasi berbasis di General Santos, di Negara Filipina, yang berpotensi memperoleh keuntungan dari hasil tangkapan ilegal tersebut. Mengingat posisi strategis perairan Indonesia yang rawan konflik, penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* perlu dikaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk menjerat korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* secara optimal di masa mendatang. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas *primum remedium* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku *illegal fishing* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang – Undang Perikanan, Undang – Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi *multi-agency* yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.

Kata Kunci : *Primum Remedium*, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, *illegal fishing*, Perairan Indonesia.

IMPLEMENTATION OF THE PRIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN ATTEMPTING TO HOLD CORPORATIONS CRIMINALLY RESPONSIBLE FOR COMMITTING ILLEGAL FISHING IN INDONESIA WATERS

(Judge's Decision Study Number 7/Pid.Sus-Prk/2023)

(Fadhil Andika Satria, 2220112005, xii + 142 Pages, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 2025)

UNIVERSITAS ANDALAS **ABSTRACT**

Indonesia as an archipelagic country has great fisheries potential, but illegal fishing crimes committed by foreign vessels and fisheries corporations often threaten these resources. The lack of supervision and legal action means that the judicial process often only ensnares the crew without touching the corporation as the main actor. The case in Fisheries Court Decision No. 7/Pid.Sus-PRK/2023 shows that the conviction and criminal liability were only imposed on the skipper, even though the facts in the trial showed indications of the connection between the vessel FB.LB. "Liam Gil-2" with NRT Integrated Industries Inc, a corporation based in General Santos, in the Philippines, which potentially benefited from the illegal catch. Given the strategic position of Indonesian waters that are prone to conflict, the application of criminal law as a *primum remedium* needs to be studied philosophically, sociologically, and juridically to optimally ensnare corporate perpetrators of illegal fishing in the future. Based on these issues, the problem statement in this research are: First, What is the view of criminal law on the application of the principle of *primum remedium* in an effort to hold corporations criminally responsible for committing illegal fishing in Indonesian waters in the study of Decision No. 7/Pid.Sus-Prk/2023? Second, What are the inhibiting and supporting factors in the application of the *primum remedium* principle in an effort to hold corporations criminally responsible for committing illegal fishing in Indonesian waters in the study of Decision No. 7/Pid.Sus-Prk/2023? This research uses normative juridical methods. The types and sources of data in this research are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. As for the first research result, the application of the *primum remedium* principle in corporate criminal liability for illegal fishing in Indonesia has a strong legal basis through Law No. 31 of 2004 juncto Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, which is strengthened by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This principle places criminal law as the main instrument to ensure corporate accountability and provide a deterrent effect. However, its application in court in Fisheries Court Decision No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 shows the weakness of legal action against corporations because convictions are more often directed at individual actors than corporate entities. Second, the national legal framework, including the Fisheries Law, the Job Creation Law, and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, has provided a clear juridical basis, the implementation of which is still constrained by the limited jurisdiction of UNCLOS 1982, complicated multi-agency coordination, weak law enforcement integrity, and difficulties in proving corporate involvement.

Keyword : *Primum Remedium, Criminal Liability, Corporations, Illegal Fishing, Indonesian Waters.*